

PEMETAAN KINERJA / KERANGKA LOGIS PERUBAHAN RPJMD 2018 - 2023 MISI 1

PEMETAAN KINERJA / KERANGKA LOGIS PERUBAHAN RPJMD 2018 - 2023 MISI 2

SINERGITAS PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

TERLAKSANANYA OPTIMALISASI PARTISIPASI DAN KOLABORASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN
 Indikator:
 Tingkat Partisipasi dan Kolaborasi Masyarakat dan Swasta dalam Pembangunan
 Data Awal Tahun 2018 = N/A
 Target Tahun 2023 = 80,50

MENINGKATNYA PARTISIPASI DAN KOLABORASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN
 Indikator:
 Tingkat Partisipasi dan Kolaborasi Masyarakat dalam Pembanguan
 Data Awal Tahun 2018 : N/A
 Target Tahun 2023 = 81,50

OPTIMALISASI TINGKAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK

TERLAKSANANYA REFORMASI BIROKRASI
 Indikator:
 Indeks Reformasi Birokrasi
 Data Awal Tahun 2018 = 69,81
 Target Tahun 2023 = 70,13

MENINGKATNYA KAPASITAS DAN AKUNTABILITAS KINERJA BIROKRASI
 Indikator:
 Persentase Perangkat Daerah dengan nilai IKM "Baik" (minimal 83) dari pada tahun 2018 sebesar 51,61% menjadi 100% Tahun 2018

MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN KECAMATAN

ISU STRATEGIS

FINAL OUTCOME
TUJUAN

LONG TERM OUTCOME
SASARAN RPJMD

INTERMEDIATE OUTCOME
INDIKATOR SASARAN PD

PROGRAM (CASCADING ESSELON III)

KEGIATAN (CASCADING ESSELON IV)

SUB KEGIATAN (CASCADING ESSELON IV)

MENINGKATNYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN KECAMATAN PANYILEUKAN
 Indikator:
 Persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul Kecamatan Panyileukan Data Awal Tahun 2018 = 84.07
 Target Tahun 2023 = 80

MENINGKATNYA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT KECAMATAN PANYILEUKAN
 Indikator:
 Presentase Siskamling RW Aktif
 Data Awal Tahun 2018 = N/A
 Target Tahun 2023 = 64.87

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
 Indikator:
 Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Unggul Kecamatan Panyileukan
 Data Awal Tahun 2018 = 84.07
 Target Tahun 2023 = 80

PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
 Indikator:
 Persentase Siskamling RW Aktif
 Data Awal Tahun 2018 = N/A
 Target Tahun 2023 = 64.87

1. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
2. Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan

1. Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan PERDA dan PERKADA

1. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
2. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
3. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
4. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

1. Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

MENINGKATNYA PELAYANAN PUBLIK KECAMATAN PANYILEUKAN
 Indikator:
 Persentase Kelurahan Unggul
 Data Awal Tahun 2018 = N/A
 Target Tahun 2023 = 100

MENINGKATNYA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KECAMATAN PANYILEUKAN
 Indikator:
 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Panyileukan
 Data Awal Tahun 2018 = 83.31,
 Target Tahun 2023 = 85.4

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
 Indikator:
 Persentase Kelurahan Unggul
 Data Awal Tahun 2018 = N/A
 Target Tahun 2023 = 100

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Indikator:
 Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Data Awal Tahun 2018 = N/A
 Target Tahun 2023 = 90

1. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan
2. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
3. Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
4. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat

1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
3. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
4. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
3. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor
4. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
5. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
6. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
7. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
9. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
10. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
11. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
12. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas
13. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
14. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya